MUSYAWARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA: *EVIDENCE BASED SOLUTION FROM INDONESIA*

Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir

Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
akhmadkamil23@gmail.com; ahmad.dakhoir@iain-palangkaraya.ac.id;

Received:06-06-2020; Revised:20-12-2020; Accepted: 25-12-2020;

ABSTRACT

Inheritance in Islam is known as the Faraidh, the science that regulates the distribution of inheritance. The distribution of inheritance given to heirs in the process it can take be without dispute or with dispute. Settlement of inheritance disputes is common, but it is different in the case of a family that has differences in religious beliefs. One of the barrier factors of inheritance in Islam is different religions, namely the existence of religious differences between the heir from and the inheritor. Settlement of disputes with the concept of deliberation is believed to be able to solve problems that tend to occur in the era of this century. The purpose of this research is to provide solutions to the problems of heirs of different religions so that the implementation of inheritance can be resolved without a dispute. This research method used descriptive-qualitative method, the writer will trace and analyze deliberations as an alternative to resolving disputes of different religions. The results of this research is deliberations can be used as an alternative solution to the resolution of disputes between different religions by prioritizing the public good.

Keywords: *Islamic inheritance, Deliberation, and Difference in Religion.*

INTISARI

Kewarisan Islam dikenal dengan istilah Ilmu Faraidh, yaitu ilmu yang mengatur tentang pembagian harta waris. Pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Penyelesaian sengketa waris banyak terjadi, namun beda halnya dengan kasus sebuah keluarga yang memiliki perbedaan dalam keyakinan keagamaan. Salah satu faktor penghalang kewarisan dalam Islam ialah berbeda agama, yaitu adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Penyelesaian sengketa dengan konsep musyawarah diyakini mampu menyelesaikan masalah yang cenderung terjadi di era abad ini. Tujuan penelitian ini adalah memberikan solusi terhadap permasalahan ahli waris yang berbeda agama sehingga pelaksanaan waris dapat diselesaikan tanpa adanya sengketa. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penulis akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa beda agama. Hasil penelitian ini adalah musyawarah dapat digunakan sebagai sebuah solusi alternatif penyelesaian sengketa waris beda agama dengan mengedepankan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Waris Islam, Musyawarah dan Beda Agama.

A. Pendahuluan

Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, bangsa Indonesia yang menganut berbagai aneka ragam macam agama dan kepercayaan mempunyai keberagaman bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini sangat berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Di antara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat hanya satu sifat kekeluargaan, melainkan berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan sistem kekeluargaan yaitu: sifat kebapakan (*patrilineal*), sifat keibuan (*matrilineal*) serta sifat kebapakan-keibuan (*parental*).¹ Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dan hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya.

Sejak perkawinan, istri masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga anak-anak atau keturunan dari perkawinan tersebut, kecuali bagi anak perempuannya yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Corak yang utama dari perkawinan dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan, ialah perkawinan dengan jujuran, dimana si istri dipinang oleh keluarga suaminya dari si keluarga si istri dengan sejumlah uang sebagai pemberian. Contohnya di Batak, Gayo, Alas, Ambon, Irian, Timor dan Bali.²

Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia hanya terdapat disatu daerah, yaitu di Minangkabau. Setelah perkawinan di daerah itu terjadi, si suami turut berdiam di rumah istri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si istri, tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.³

Kekeluargaan yang bersifat kebapak-keibuan adalah yang paling merata dan banyak terdapat di Indonesia yaitu, di Jawa, Madura, Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Sistem kekeluargaan semacam ini hakikatnya tiada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si istri, dan si istri juga menjadi keluarga si suami. Dapat dimengerti, bahwa melihat perbedaan dari tiga sifat kekeluargaan tadi, ada perbedaan pula dalam sifat kewarisannya.

Mengenai besarnya bagian warisan dapat dicatat ada beberapa hal yang penting mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih dipertahankan secara ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan, walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat Islam sendiri yang menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi karena dalil Al-Quran tentang hal ini tegas, Kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut diatas.⁴

Menurut Pandangan Agama Islam apabila si peninggal warisan meninggalkan anak pria maupun anak wanita. Dalam hal ini anak wanita dianggap sebagai ashabah, yaitu tidak mendapat bagian tertentu pada harta warisan, tetapi bersama-sama dengan anak pria mendapatkan seluruh

¹ Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 40.

² *Ibid*, 40.

³ *Ibid*, 41.

⁴ Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 2010), 49.

sisanya dari harta warisan setelah diambil bagian-bagian tertentu dari ahli waris tambahan yang lain, umpamanya seperti ibu dan janda si peninggal. Hanya saja ditetapkan anak wanita mendapat sebagian dari bagian anak pria.⁵

Al-Qur'an bagi umat Islam merupakan sumber utama untuk semua sisi kehidupan, sekaligus menjelaskan berbagai prinsip; baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal individu dengan Tuhan maupun hubungan horizontal manusia antara individu dalam masyarakat. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua persoalan yang berkenaan dengan dua masalah tersebut dengan mudah dapat diselesaikan. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan masa sesudahnya. Sehubungan dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi, umat Islam terus berusaha untuk memahami dan menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an untuk diselaraskan dengan situasi yang ada, sampai saat ini era modern-kontemporer.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.⁶

Salah satu persoalan umat yang menjadi polemik saat ini adalah fenomena pernikahan beda agama. Praktek pernikahan ini, disadari maupun tidak, merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan yang telah menjadi realita empirik dengan grafik kuantitasnya yang semakin meninggi. Fenomena tersebut, di satu sisi merupakan bagian dari permasalahan yang menuntut solusi hukum Islam. Di sisi lain juga merupakan problem krusial yang senantiasa mengharapkan sekaligus menuntut solusi nan arif bijaksana.

Kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi terbatas hanya dalam satu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga menembus dinding-dinding batasan golongan, suku, ras dan agamanya. Dalam kondisi pergaulan yang seperti itu maka bukan suatu hal yang mustahil untuk membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, antar golongan, antar ras dan antar agama.

Sebagai negara yang besar Indonesia mempunyai beragam etnis, suku, bangsa, budaya serta agama. Konstitusi menjamin setiap pemeluk agama bebas menjalankan dan mengamalkan agamanya masing-masing dengan seluas-luasnya. Setiap agama mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya, meskipun prinsip-prinsip dasarnya berbeda-beda. Kebaikan yang diajarkan agama mempunyai dimensi yang universal, sehingga antara pemeluk agama diharuskan untuk mengamalkan ajaran agamanya agar tercipta keharmonisan antar umat beragama.

Keharmonisan antar umat beragama akan melahirkan nilai-nilai positif tersendiri bagi masyarakat, namun juga terkadang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, sebagai contoh adalah ketika dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin dan saling menyayangi, saling

⁵ Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 50.

⁶ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 201.

mengasihi, mereka menghendaki ikatan suci yaitu sebuah perkawinan, sementara agama mereka berbeda dan masing-masing dari mereka tetap berprinsip teguh pada keyakinan agamanya masing-masing. Hingga pada akhirnya kematian akan datang sehingga terbitlah kewarisan beda agama. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan tersendiri mengenai kewarisan beda agama yang secara tektual hadis Nabi Muhammad SAW tegas mengenai beda agama sebagai penghalang kewarisan dalam Islam⁷. Sehingga perlu adanya konsep alternatif dalam penyelesaian waris beda agama yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: *Evidence Based Solution From Indonesia?*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sehingga Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berbagai hal yang ada hubungannya dengan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris beda agama, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penulis akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris beda agama, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama dalam Islam

Dalam hukum kewarisan yang diatur hukum Islam, cara pembagian harta warisan disebut dengan istilah ilmu faraidl yaitu ilmu tentang cara pembagian harta warisan, yang sudah diatur pembagian-pembagiannya. Perkembangan hukum waris Islam terdapat beberapa hukum adat waris yang telah dituangkan menjadi hukum waris Islam yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Misalnya tentang harta gono gini, anak angkat, harta kekayaan berupa lahan pertanian yang tidak dapat dibagi-bagi, karena kurang dari 2 ha, pembagian secara musyawarah (damai/*ishlah*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183, Pasal 190 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.⁸ Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama.

Salah satu sumber obyek sengketa klasik dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian

⁷ Hadis Nabi Muhammad SAW :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.

bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional atau merata sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang bisa saja membuat orang menjadi kaya mendadak karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin mendadak karena tidak mendapatkan bagian harta warisan tersebut.

Menurut hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung lancar tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun beda halnya dengan kasus sebuah keluarga yang memiliki perbedaan dalam keyakinan keagamaan.

Salah satu faktor penghalang kewarisan dalam Islam ialah berbeda agama, yaitu adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.⁹ Semua mujtahid sepakat bahwa non muslim tidak dapat jadi ahli waris dari pewaris muslim. Hal tersebut di dasari pada hadis Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Meskipun demikian, di antara sekian banyak pendapat yang mengharamkan muslim menerima warisan dari orang non-muslim, berbicara tentang hukum terdapat pula perbedaan pendapat di antara para ulama fihiyyah. Adapun ulama yang juga membolehkan adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sedangkan dari golongan ulama kontemporer, adalah Yusuf al-Al-Qaradhawi.¹⁰ Menurutnya, memaknai hadis terbut menggunakan takwil, yang dimaksud kafir dalam hadis larangan waris bagi orang kafir ialah kafir harbi, sehingga orang-orang muslim tidak memberikan warisan kepada kafir harbi yang benar-benar memerangi orang muslim, karena terputus ikatan antar keduanya. Adapun kafir zimmi boleh sebagaimana dikatakan Mu’az bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sofyan dan Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa “orang Muslim dapat menerima hak waris dari orang kafir, tanpa sebaliknya”¹¹

Pendapat ulama yang melarang Muslim mewarisi kafir terlihat terlalu tektual dan tidak terlalu mengaitkan teks dengan maksud yang ingin dicapai oleh teks tersebut, yaitu kemaslahatan. Pendapat ini juga tampak tidak memperhatikan keberlakuan teks dengan kondisi zaman, padahal dalam masalah *mu’āmalah*, keberlakuan teks haruslah memperhatikan situasi dan kondisi serta kapan teks itu harus diberlakukan.¹²

Jika dianalisis melalui teori maslahat, tidak dipungkiri kebolehan tersebut akan

⁹ Abdul Wahid Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-1, 78.

¹⁰ Chamim Thohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari AL-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Mazahib, Vol XVI No. 1 Juni 2017, 4.

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, alih Bahasa Abdillah Obid, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 117.

¹² Dahlan Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 129.

mendatangkan beberapa kemaslahatan sebagai berikut:

- a. Kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim, akan menjadikan si Muslim terhindar dari kemungkinan terjerumus kepada kekufuran dikarenakan godaan harta duniawi.
- b. Ketika seorang anak Muslim diberi hak mendapat waris dari orang tua non-muslim, maka ia akan dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah non-Muslim.
- c. Kebolehan tersebut akan dapat menarik simpati anak-anak atau ahli waris yang kafir untuk memeluk Islam, karena menganggap agama Islam adalah agama yang sangat mengayomi.

Kemaslahatan adalah dalil agama yang *qath'i*, bersandar pada pendapat Najamuddin al-Tufi yang berpendapat bahwa ketika teks bertentangan dengan kemaslahatan, maka teks dan kemaslahatan harus didamaikan, baik dengan cara mengkhususkan teks dengan kemaslahatan, atau mendahulukan kemaslahatan dengan cara memberikan penjelasan. Dalam pandangan al-Tufi, tidak boleh dikatakan bahwa agama lebih mengetahui kemaslahatan di luar konteks ibadah sehingga kemaslahatan tersebut harus tetap diambil dari dalil agama (teks). Karena menjaga kemaslahatan adalah termasuk dalil agama, maka menjaga kemaslahatan adalah yang paling kuat dan yang paling khusus. Dengan demikian, ketika mengambil kemaslahatan, ia harus didahulukan. Dan ini tidak terjadi dalam ibadah yang tidak bisa diketahui kemaslahatannya. Menurut al-Tufi, jika kita melihat dalil syari'at yang ambigu untuk menjelaskannya, kita harus tahu bahwa syariat telah menyerahkan kepada kita untuk memperhatikannya.¹³

Nampaknya hadis yang melarang tersebut sesuai dan relevan dengan kemaslahatan dalam konteks di mana hadis tersebut muncul, yaitu pada masa Nabi saw. Kemungkinan larangan dalam hadis tersebut benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan pada masa tersebut, masa di mana kaum Muslimin adalah kaum yang masih minoritas, sehingga larangan saling mewarisi antara Muslim dengan kafir diperintahkan semata-mata demi untuk menyelamatkan kaum Muslimin dari kezaliman orang-orang kafir.

Namun demikian, baik minoritas maupun mayoritas tidaklah menjadi ukuran boleh tidaknya Muslim mewarisi kafir, tetapi maslahat atau mudharat yang akan diperoleh umat sebagai akibat dari penerapan hukum, itulah yang menjadi ukuran boleh atau tidaknya Muslim mewarisi kafir. Adapun ketika zaman telah berubah, maka hukum bisa berubah sesuai kebutuhan umat Islam guna mencapai kemaslahatan.

2. Pluralisme Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama di Indonesia

Kajian mengenai hukum dapat ditinjau dari berbagai dimensi, baik dalam konteks yang dibuat oleh negara, maupun dalam konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara terbatas hukum dikaitkan dengan hukum negara, khususnya undang-undang (*law in the book*). Para Antropolog menangkap hukum sebagai suatu acuan normative yang luas dan terus hidup dan berkembang secara dinamis (*living law*), meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan actor yang ada di dalamnya. Hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, tetapi juga berisi konsep kognitif.¹⁴

Pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya

¹³ Chamim Thohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama ...*, 13.

¹⁴ Bakti, *Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56 Th. XVII, 2015, 135.

keteraturan hukum (*legal order*) yang diproduksi negara.¹⁵ Situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Karena itu, adalah keniscayaan, bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tata hukum yang plural. Sebaliknya, pemaksaan sentralisme hukum adalah pekerjaan sia-sia karena sifatnya asosial.¹⁶

Pada konteks ini, pluralisme hukum merupakan konsep yang menunjukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia di suatu tempat. Pluralisme hukum mengandaikan adanya pilihan dalam penerapan hukum. Pilihan terhadap sebuah perilaku dipelajari, khususnya dalam kasus-kasus konflik. Jarang sekali hanya ada satu kemungkinan dalam hal yang berurusan dengan konflik. Selain ada peradilan yang resmi oleh aparat pengadilan dari negara, biasanya ada pilihan yang sangat luas, seperti penengah dan juru runding.¹⁷

Indonesia dengan keberagaman suku dan agama, secara kontekstual, kemaslahatan sebaiknya didahulukan. Sejatinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian kehidupan bersama.

Keberadaan hukum tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Masyarakat, persekutuan hidup, atau organisasi kehidupan sosial merupakan basis dan modal yang utama bagi berlangsungnya kehidupan hukum.¹⁸ Tanpa masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa hukum masyarakat dapat berjalan.¹⁹ Hukum sebagai suatu kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat akan senantiasa ada dan mengikuti dinamika yang lahir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.²⁰

Selaku bagian dari masyarakat, hukum tidak mungkin bersifat statis, melainkan harus dinamis mengikuti kebutuhan dan tuntutan perubahan masyarakat. Perubahan dan perkembangan dalam suatu masyarakat merupakan suatu keadaan yang normal. Hukum-hukum yang dibuat harus mampu membuat masyarakat untuk hidup dalam suasana ketertiban dan ketentraman.²¹

Hukum dituntut berperan melampaui batas normativitas peraturan, sehingga dapat menyentuh akar persoalan, pluralisme hukum menawarkan pluralitas memahami hukum dengan tiga aspek penting, yaitu *natural law*, *positive law*, dan *socio legal*. Pancasila diletakkan sebagai landasan *ethic/moral/religion* dalam *natural law*, sehingga Pancasila menjadi landasan filosofis keberlakuan seluruh peraturan di Indonesia. *State Positive law* adalah peraturan perundang-

¹⁵ Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Tim HuMa, 2005. .3.

¹⁶ Bakti, *Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme ...*, 136.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009), 94.

¹⁹ *Ibid.*, 9.

²⁰ Destri Budi Nugraheni & Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 20.

²¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 77.

undangan. *Law Society*, diperlukan sebagai pendekatan yang menggabungkan pendekatan normatif (*normologic*) dan sosiologi (*nomologic*). Dengan demikian, dialektika antara moral ethic religion, normologic dan nomologic diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa.²² Musyawarah sebagai bagian daripada law society yang berlandaskan natural law berperan penting dalam pemecahan setiap masalah, terkhusus waris beda agama, karena hal tersebut mengakomodir kepentingan bersama dan penyelesaian yang adil dan sempurna. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, penyelesaian sengketa waris beda agama dapat diupayakan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian ini lebih diutamakan untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai.

3. Musyawarah sebagai *Middle Path Solution* Sengketa Waris Beda Agama

Kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah *syura* yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maka musyawarah berarti menampakkan sesuatu yang awalnya tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada orang lain. Prinsip musyawarah dapat dijumpai dalam QS Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²³

Artinya: “Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu).”

Hal senada juga ditegaskan dalam QS Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ²⁴

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Nash ini dengan tegas menyatakan “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,” Islam menetapkan prinsip ini dalam sistem pemerintahan, hingga nabi Muhammad Saw sendiri melakukannya.²⁵ Adapun syura beserta implementasinya, adalah persoalan teknis yang dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku di kalangan umat dan kondisi yang melingkupi kehidupannya. Maka, semua bentuk dan cara yang dapat merealisasikan syura bukan sekedar simbol lahiriah saja adalah berasal dari Islam.

²² Novita Dewi Masyithoh, *Dialektika Pluralisme Hukum :Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman keberagaman dan keberagamaan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan, Vol 24 No. 2., November 2016, 5.

²³ Q.S. Ali Imran (3): 159.

²⁴ Q.S. Asy-Syura (24): 38.

²⁵ Dudung Abdullah, *Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*, Jurnal Al-Daulah UIN Alauddin, Vol 3, No. 2, Desember 2014, 3.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sangat berpegang teguh kepada Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Nilai-nilai sosial dan politik dalam Piagam Madinah berpijak pada prinsip universalisme Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Di sisi lain, Piagam Madinah sebagai konsensus politik kolektif yang lahir dari kondisi sosio-kultural masyarakat Madinah yang majemuk. Seluruh pihak (penduduk madinah yang majemuk) yang terlibat dalam konsensus politik tersebut disebut sebagai ummatun wahidah, tidak peduli apa latar belakang agama dan ras mereka. Legalisasi piagam Madinah merupakan upaya konstitusional yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun sebuah masyarakat baru yang bebas dari fanatisme kesukuan. Bingkai nilai-nilai tersebut, entitas Piagam Madinah membentuk karakter.

Prinsip musyawarah, amanah, transparansi, dan kejujuran dalam berpolitik menjadi strategi jitu Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani yang demokratis. Hal ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW saat pertama kali hijrah ke Yastrib, ia melakukan dua hal. Pertama, mendirikan Masjid Nabawi sebagai tempat pertemuan dan permusyawaratan penduduk Yastrib yang majemuk dalam memecahkan berbagai persoalan. Kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar.

Kedua tindakan tersebut mengisyaratkan bahwa sejak mula Nabi Muhammad SAW menginjaki tanah Yastrib, beliau telah menghendaki kehidupan yang demokratis yang kemudian dituangkan dalam Piagam Madinah.²⁶ Dari situ pula, fanatisme kesukuan tidak lagi menjadi landasan kehidupan baik sosial, budaya, maupun politik. Nabi Muhammad SAW mengikat penduduk Madinah dalam sebuah ikatan spiritual yang mengindahkan persatuan, perdamaian, dan kasih sayang. Fanatisme kesukuan yang selama ini menjadi basis sosio-kultural dan sosio-politik penduduk Yastrib hanya menjerumuskan mereka ke dalam konflik, permusuhan dan perpecahan yang panjang dan menjadi penghalang bagi proses keadaban dan peradaban Kota Yastrib. Narasi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan membangun Kota Madinah yang mengutamakan prinsip musyawarah sangat ideal dan relevan untuk diaktualisasikan dalam penyelesaian permasalahan di Indonesia.²⁷

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.²⁸ Bagi orang Islam, menerima asas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan asas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan konsensus yang berhikmat kebijaksanaan, bukan sembarang konsensus yang bisa melenceng atau transaksi kepentingan semata-mata.²⁹ Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan sehingga dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan.

Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan guna menjamin musyawarah dapat terlaksana

²⁶ Bunyamin, *Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur'an*, Jurnal Al-Adl, Vol 10, No. 1 Tahun 2017, 2.

²⁷ M. Ali Rusdi, *Wawasan Al-Qur'an tentang Musyawarah*, Jurnal Tafseer STAIN Pare-Pare, Vol 2, No. 1 Tahun 2014, 10.

²⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), 203.

²⁹ Soetjipto Wirosardjo, *Dialog dengan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan, 1995), 203.

sesuai dengan semangat yaitu musyawarah untuk mufakat, menurut tatanan kemasyarakatan ada satu rujukan baku yang dipatuhi bahkan bagi umat Islam yang diimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama, *Commonn Platform*. Dalam Islam *Commonn Platform* itu adalah Al-Qur'an dan Hadist. Di Indonesia *Commonn Platform* itu adalah Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksanakan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.³⁰

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keragaman suku, budaya, ras, agama dan bahasa. Keragaman inilah yang akan menjadi pemersatu bangsa. Berbagai keragaman ini dipersatukan dengan adanya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merdeka yang lahir tahun 1945 dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Pancasila adalah hasil perenungan dan pemikiran manusia Indonesia yang mendalam yang terdiri dari 5 sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan, antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling hubung menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan.³¹

Sila keempat didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu pelaksanaan sila keempat ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila yang lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila keempat dengan sila yang lain senantiasa merupakan satu kesatuan. Sila keempat dengan sila yang lain saling memiliki keterkaitan. Salah satunya dalam nilai-nilai sila ke-4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang memiliki rasa demokrasi. Menurut Widjaja³² penerapan sila ke-4 pancasila yaitu:

Demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat yang bersumber pada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan dan kemitraan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan seyogiannya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dan yang penting pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus bertanggung jawab. Dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, musyawarah, pemerintah, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan pendapat

³⁰*Ibid.*, 205.

³¹ Herlambang, *Perwujudan Sila ke Empat Pancasila setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 26., No. 2, Agustus 2017, 4.

³² H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 19-20.

diselesaikan dengan penalaran dan ditimbang oleh hati nurani. Dalam musyawarah tidak ada yang merasa dimenangkan dan atau dikalahkan kepentingan pribadi atau perseorangan umum atau orang banyak

Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Berkaitan dengan kepentingan bersama, musyawarah mufakat merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, dan juga merupakan salah satu nilai dasar yang tertera pada Sila ke empat Pancasila, yang diseluruh daerah tentunya memiliki budaya musyawarah mufakat dengan nama dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Budaya musyawarah mufakat tentunya harus terus dijaga keutuhannya, dilestarikan pelaksanaannya, dan dilaksanakan kegiatannya di sekitar lingkungan.³³

Di dalam advokasi, musyawarah merupakan upaya hukum non litigasi yang bisa ditempuh dengan cara mengundang pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang terjadi. Pembahasan untuk mencari titik temu tersebut biasanya dapat berlangsung lebih dari satu kali dan hal itu sah-sah saja. Namun tak ada salahnya bila musyawarah tak lebih dari dua kali untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara, bila ternyata tidak mendapatkan titik temu barulah ditempuh jalur hukum ke pengadilan.³⁴

Upaya musyawarah dalam menyelesaikan perkara waris beda agama banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus di Kalimantan Tengah, hal ini sesuai dengan semangat nilai-nilai Islam dan Pancasila.³⁵ Dalam perkara seperti ini ada kalanya penyelesaian tak melulu harus lewat pengadilan. Kedua lawan dapat duduk bersama mencari solusi. Bila penyelesaian dapat disepakati di luar pengadilan maka perkara dianggap selesai. Dan setiap permasalahan dan kesepakatan dibuat secara tertulis dan diselesaikan oleh kedua pihak agar saat ditanyakan oleh hakim bisa menjadi dasar yang kuat.³⁶

Dalam konteks Indonesia saat ini, musyawarah merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian waris beda agama, dikarenakan saat ini warga Indonesia yang beragama muslim dan non-muslim hidup berdampingan, tanpa ada permusuhan dan saling mengganggu, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam. Sehingga musyawarah dapat dijadikan *middle path solution* yang menjawab persoalan serta mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman, terlebih jika dikaitkan dengan maqashid³⁷ hukum Islam, hal ini memberikan kemaslahatan yang adil dan sempurna.

D. Kesimpulan

Diskursus hukum kewarisan beda agama telah menjadi perdebatan panjang dari masa

³³ Yesi Eka Pratiwi & Sunarso, *Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi PPKN Fkip Unila*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 20, No. 3, Nopember 2018, 201.

³⁴ Sartono dan Bhukti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta; Dunia Cerdas, 2013), 129.

³⁵ Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), 66.

³⁶ *Ibid.*, 30.

³⁷ Maqashid syariah tidak dapat dipisahkan dengan masalah, karena substansi wujud daripada maqashid syariah adalah kemaslahatan. dDlam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Lihat Musolli, *Maqashid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal At-Turas, Vol. 5, No. 1 Januari-Juni Tahun 2018, 3.

ulama klasik hingga kontemporer. Perbedaan pendapat pun hadir di tengah-tengah ulama terhadap perdebatan hangat tersebut. Para ulama sepakat tentang larangan seorang kafir yang mewarisi harta seorang Muslim. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum seorang Muslim yang menjadi ahli waris seorang kafir. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok ulama yang mengharamkan Muslim menerima warisan non Muslim, dan kelompok yang membolehkan Muslim menerima warisan dari keluarganya yang non Muslim. Ulama yang mengharamkan Muslim mewarisi kafir bersandar pada teks hadis. Sedangkan ulama yang membolehkan bersandar pada dalil kemaslahatan. Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Berkaitan dengan kepentingan bersama. Hal ini pun senada seiring dengan ajaran agama Islam yang diterangkan dalam surat As-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Sehingga Musyawarah sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat diutamakan dalam penyelesaian sengketa waris beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung, "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Al-Daulah*, UIN Alauddin, Vol 3, No. 2, 2014.
- Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011).
- Bakti, "Pluralisme Hukum Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Di Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, 2015.
- Bunyamin, "Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-'Adl*, Vol 10, No. 1, 2017.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- H., Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 2010).
- Herlambang, *Perwujudan Sila ke Empat Pancasila setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 26., No. 2.
- Ilhami, Haniah, & Nugraheni, Budi, Destri, 2014, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).
- Latipulhayat, Atip, "Khazanah Friedrich Karl von Savigny", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No 1, 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995).
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Masyithoh, Novita Dewi, "Dialektika Pluralisme Hukum :UpayaPenyelesaian Masalah Ancaman keberagaman dan keberagaman di Indonesia", *Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan*, Vol 24 No. 2, 2016.
- Muhibbin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010).

- Musolli, “Maqashid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal At-Turas*, Vol. 5, No. 1, 2108.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2009).
- Rikardo Simarmata, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Tim HuMa, 2005).
- Rusdi, M. Ali, “Wawasan Al-Qur’an tentang Musyawarah”, *Jurnal Tafseer STAIN Pare-Pare*, Vol,2, Nomor 1, 2014.
- Sunarso & Yesi Eka Pratiwi, “Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi PPKN Fkip Unila”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 3, 2018.
- Suryani Bhekti dan Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta; Dunia Cerdas, 2013).
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Thohari, Chamim, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari AL-Usul Al-Khamsah”, *Jurnal Mazahib*, Vol XVI No. 1, 2017.
- Wahid, Abdul, Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Widjaja, H.A.W, *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Wirosardjo, Soetjipto Wirosardjo, *Dialog dengan Kekuasan*, (Bandung: Mizan, 1995).